

A B S T R A K S I

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengatur mengenai sanksi hukum dan sanksi etika terhadap Notaris. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pedoman moral dan etika dalam berprofesi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum penjatuhan sanksi hukum dan etika terhadap Notaris bagi akta yang dibuatnya serta bagaimanakah tanggungjawab Notaris apabila dijatuhi sanksi hukum dan etika, tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Menggunakan Metode penelitian normatif dan doktrinal, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian, dokumen dan penelusuran pustaka yang berkaitan dengan implikasi yuridis terhadap akta notaris atas penjatuhan sanksi hukum dan etika yang dijatuhi pada Notaris. Sedangkan analisisnya dilakukan secara deduktif. Hasil pengumpulan data diketahui bahwa penjatuhan sanksi perdata terhadap Notaris atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mengakibatkan Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum. Penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris tidak serta merta mengakibatkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Karena penjatuhan sanksi administratif ini tidak berkaitan dengan aspek lahir, formil dan materiil akta Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris tidak serta merta mengakibatkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya menjadi batal demi hukum. Mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan pada aspek formal akta, tidak akan membatalkan akta Notaris yang dijadikan objek perkara pidana tersebut, dengan demikian akta yang bersangkutan tetap mengikat para pihak. Dengan dijatuhkannya sanksi etika terhadap seorang Notaris tidak mengakibatkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan, akta tersebut tetap mengikat para pihak. Tanggung jawab Notaris Akibat penjatuhan sanksi Hukum dan Etika adalah Notaris tersebut harus melaksanakan sanksi hukum dan etika tersebut

Kata Kunci : Sanksi hukum, Sanksi Etika, Akta Notaris

ABSTRACT

Undang-undang Number 30 of 2004 about the position of Notary Public and ethical code of Ikatan Notaris Indonesia (INI) has arranged the law punishment and ethics toward Notary Public. Therefore, to implement their duty as the Notary public, they must obey and implement the certainty in Undang-undang Number 30 of 2004 about the position of Notary Public and the ethical code of Ikatan Notaris Indonesia (INI) as the orientation of moral and ethics in performing their profession. The target of this thesis arranging is to know the consequence of giving law punishment and ethics toward Notary Public for the document they made; besides, it is purposed to know the responsibility of notary public if they are given law punishment and ethics, of course in the law corridor in the same manner as in Undang-undang Number 30 of 2004 about the position of Notary Public and ethical code of Ikatan Notaris Indonesia (INI). This thesis is done by using normative and doctrinal researches method, the data is collected by researching, documenting and investigating related with juridical implication toward official document of notary public as the result of giving law punishment and ethics. Meanwhile the analysis is done deductively. The result of data collection is that civil punishment toward Notary Public for the official document which is made by certain Notary Public, makes the official document of Notary Public has less power of evidence or this official document invalid in front of law. Administrative punishment giving toward Notary Public does not make the certain official document becomes invalid. It is because this administrative punishment giving is not related with physical aspect, formal, and material of Notary public's official document. Civil punishment toward Notary Public does not make the certain official document becomes invalid. Punishment giving with reasons in formal factor does not make the official document which is used as the object of criminal case becomes invalid; the related official document still makes some sides depend on it. Ethical punishment giving toward a Notary Public does not make the official document which is made by certain Notary Public makes the official document of Notary Public becomes invalid, it still makes some sides depend on it. The responsibility of Notary Public as the result of law punishment and ethics giving is those certain Notary Public should apply those law punishment and ethics.

Keywords: Law punishment, Ethical Punishment, Official document of Notary Public

Detec,
Guide Lecturer

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH, CN.
NIP. 132 303 985